**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

NAMA SEKOLAH : SMAN 1 Cluring Banyuwangi

MATA PELAJARAN : PPKN

KELAS / SEMESTER : X / GANJIL

MATERI POKOK : Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktek Penyelenggaraan

Kekuasaan Negara

ALOKASI WAKTU : 8 X 45 Menit

**KOMPETENSI INTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Kompetensi Inti (K I)** |
| **K . I . 1** | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya |
| **K. I. 2** | Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. |
| **K . I . 3** | Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. |
| **K. I. 4** | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan |

1. **Kompetensi Dasar dan indikator pencapaian Kompetensi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kompetensi Dasar (KD)** | **No** | **Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)** |
| **1.1** | |  | | --- | | Mensyukuri nilai-nilai Pancasia dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa | | **1.1.1**  1.1.2 | * Mensyukuri nilai – nilai toleran dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara * Mensyukuri nilai nilai kejujuran dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara |
| **No** | **Kompetensi Dasar (KD)** | **No** | **Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)** |
| **2.1** | |  | | --- | | Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | | 2.1.1  2.2.2. | * Menjalankan nilai – nilai toleransi dlam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara * Menjalankankan nilai – nilai kejujuran dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negra |
| **No** | **Kompetensi Dasar (KD)** | **No** | **Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)** |
| 3.1 | Menganalisisnilai-nilaiPancasiladalamkerangkapraktikpenyelenggaraanpemerintahan Negara | 3.1.1  3.1.2  .  3.1.3  3.1.4 | * Menjelaskan tugas lembaga negara dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia * Menguraikan kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non departemen * Mengurutkan kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. * Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. |
| **No** | **Kompetensi Dasar (KD)** | **No** | **Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)** |
| **4.1** | Menyajihasilanalisisnilai-nilaiPancasiladalamkerangkapraktikpenyelenggaraanpemerintahan Negara Negara | 4.1.1  4.1.2  4.1.3  . | * Mengamati nilai – nilai pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara * Menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. * Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilaiPancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. |

III.TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti proses pembelajaran model Penyingkapan(*Discovery Learning*), dan pembelajaran berbasispermasalahan(*Problem Based Learning*)peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendemontrasikan nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan sistem pemerintahan negara serta memiliki sikap bersyukur, patriotisme dan kerjasama yang tinggi.

IV. MATERI PEMBELAJARAN

Fakta : sistem pembagian kekuasaan indonesia

Konsep : - teori trias politika

- pembagian kekuasaan secara vertikal dan horisontal

- kedudukan dan fungsi kementerian negara republik indonesia dan lembaga

pemerintahan non departemen

Prosedur : penentuan jabatan lembaga negara berdasarkan ketentuan perundang - undangan

Metakognitif : Realisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

V. METODE PEMBELAJARAN

- Pendekatan : Saintifik

- Metode : Presentasi, Dialog,Tanya Jawab dan Penugasan

- Model : **Problem Based Learning**

VI. MEDIA PEMBELAJARAN

- Gambar Presiden bersama para Menteri

- Bagan pembagian kekuasaan lembaga negara

VII. SUMBER BELAJAR

* Buku GuruPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sma kelas x / Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.-- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

* Buku Pendidikan Pancaasila dan Kewarganegaraan klas x,Tiga serangkai pustaka mandiri, Solo,2017
* UUD NRI 1945
* Buku lain yang relevan
* Internet

VIII. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN

**PERTEMUAN PERTAMA**

**Indikator Pencapaian Kompetensi**

1) Membangun nilai-nilai Toleran dan Kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.

2) Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan.

3) Menyaji hasil analisis yang mengenai tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila

dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.

4) Mengkomunikasikan hasil analisis yang terkait dengan pengambilankeputusan bersama sesuai nilai-nilai

Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kegiatan | Langkah - langkah | Alokasi Waktu |
| **Pendahuluan**  **( 15 menit )**  **Orientasi peserta**  **didik pada masalah** | 1. Guru mengucapkan salam dan mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas ( **membuang sampah pada tempatnya dan menyiram bunga** ), presensi,menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. ( komunikasi ) 2. Guru mengajak semua siswa untuk berdoa bersama di pimpin salah seorang siswa, dilanjutka dengan menyanyikan lagu indonesia raya ( religiositas ) 3. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajardan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan rasa syukurpeserta didik masih dapat melanjutkan pendidikan ke jenjangpendidikan menengah (SMA). ( religius ) 4. Guru menegaskan kembali tentang topik dan tujuanpembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. 5. Guru meminta peserta didik untuk mengamati Gambar 1.1.tentang foto presiden dengan para menteri di Istana Negaraserta membaca buku Bab 1. Sistem Pembagian KekuasaanNegara, dengan Sub Bab A. Pembagian kekuasaan negaraRepublik Indonesia.     Gambar 1.1. foto presiden dan para menteri   1. Guru meminta peserta didik untuk menganalisis suatupermasalahan terkait dengan pembagian kekuasaan negaraRepublik Indonesia.( berfikir kritis ) 2. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal nyang pentingdan mungkin dapat dieksplorasi pada saat proses menganalisis   nanti. ( kreatif ) | 15 menit |
| **INTI**  **Mengorganisasi**  **peserta didik untuk**  **belajar** | 1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok yang beranggotakan 4 - 5 orang siswa, dengan pembagian tugassebagai berikut.   - Kelompok 1 dan 2 Analisis tentang kekuasaan konstitutif  - Kelompok 3 dan 4 Analisis tentang kekuasaan legislatif  - Kelompok 5 dan 6 Analisis tentang kekuasaan yudikatif  - Kelompok 7 Analisis tentang kekuasaan kekuasaan eksaminatif   1. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatatpertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didikuntuk terus menggali rasa ingin tahudengan pertanyaan secaramendalam dalam daftar pertanyaan, terkait dengan tugas yangdiberikan. ( literasi ) 2. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangandan kelompok dalam menyusun pertanyaan. ( 4 C ) 3. Selama penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentangtugas diberikan dengan indiator sebagai berikut. ( 4 C ) 4. Tugas dan wewenang lembaga negara menurut UUD NRI   Tahun 1945.  b. Hubungan kerja dengan lembaga negara lainnya.  c. Permasalahan dihadapi lembaga negara tersebut.  d. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi.  5. Guru bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu,  namun peserta didik harus berusaha untuk belajar keras. | 65 menit |
| **Membimbing**  **penyelidikan**  **individual dan**  **kelompok** | 1. Guru membantu dan membimbing peserta didik untukmengumpulkan informasi tentang Tugas yang diberikan sesuaidengan penugasannya yaitu sebagai berikut. ( literasi ) 2. Tugas dan wewenang lembaga negara menurut UUD NRI   Tahun 1945.  b. Hubungan kerja dengan lembaga negara lainnya.  c. Permasalahan dihadapi lembaga negara tersebut.  d. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi.   1. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknyadari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaanpada pesertadidik lain dalam kelompok untuk berpikir tentang jawabanterhadap pemecahan masalah terhadap kendala-kendala yangdihadapi lembaga negara tersebut. ( 4 C ) 2. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didikdengan memberi konfirmasi atas jawaban peserta didik, ataumengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah merekalakukan. |  |
| **Mengembangkan**  **dan menyajikan**  **hasil karya** | 1. Guru membimbing peserta didik dalam kelompok untuk menyusun laporan hasil kajian kelompok. ( 4 C ) 2. Laporan tersebut dapat berupa bahan tayang *(powerpoint)* ataulaporan tertulis. 3. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerja   dari kelompok penyaji pada pertemuan berikutnya. ( 4 C ) |  |
| **PENUTUP**  **(10 menit )**  **Menganalisis dan**  **mengevaluasi**  **proses pemecahan**  **masalah** | 1. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikirandan aktivitas mereka selama proses kegiatan pengumpulan informasi, proses analisis serta proses berlangsungnya tugaskelompok.   ( litersi )   1. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasiterhadap penyelidikan dan proses-proses yang telah merekalakukan. 2. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukurkepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kaliini telah berlangsung dengan baik dan lancar. 3. Menyanyikan lagu nasional ( jam terakhir ) ( nasionalis ) 4. salam |  |

**PERTEMUAN KEDUA**

**Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Membangun nilai-nilai toleransi dan kejujuran dalam kerangka praktik penyenggaraan pemerintah

negara.

1. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara RepublikIndonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen.
2. Menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang pengambilankeputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktikpenyelenggaraan pemerintahan negara.

|  |  |
| --- | --- |
| Kegiatan | Langkah - Langkah |
| Pendahuluan  ( 15 menit ) | 1. Guru mengucapkan salam dan mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas ( **membuang sampah pada tempatnya dan menyiram bunga** ), presensi,menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2. Guru mengajak semua siswa untuk berdoa bersama di pimpin salah seorang siswa, dilanjutka dengan menyanyikan lagu indonesia raya ( jam pertama ) 3. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajardan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan sara syukurpeserta didik masih dapat melanjutkan pendidikan ke jenjangpendidikan menengah (SMA). 4. Guru menegaskan kembali tentang topik dan tujuanpembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. |
| Inti  ( 65 menit ) | 1. Presentasi kelompok 1, topik Bab 1, Sub-Bab B. Kedudukan dan FungsiKementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan NonDepartemen. 2. Pada saat Kelompok 1 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materipresentasi (mengamati). 3. Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh kelompok 1, kelompok lainmemberikan saran/masukan dan mengajukan pertanyaan terkait denganmateri yang sedang dibahas (menanya). 4. Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlahtermin disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia).   Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan di presentasikan.  Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan. |
| Penutup  ( 10 menit ) | 1. Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi.  2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus  tersebut.  3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,  Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.  4.menyanyikan lagu nasional ( jam terakhir )  5. salam |

**PERTEMUAN KETIGA DAN KEEMPAT**

**Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Membangun nilai-nilai Toleransi dan Kejujuran dalam kerangka praktik penyenggaraan pemerintah

Negara

1. Menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI.
2. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang pengambilankeputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.

|  |  |
| --- | --- |
| Kegiatan | Langkah - langkah |
| Pendahuluan  ( 15 menit )  **Orientasi peserta**  **didik pada masalah** | 1. Guru mengucapkan salam dan mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas ( **membuang sampah pada tempatnya dan menyiram bunga** ), presensi,menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2. Guru mengajak semua siswa untuk berdoa bersama di pimpin salah seorang siswa, dilanjutka dengan menyanyikan lagu indonesia raya ( jam pertama ) 3. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 4. Guru meminta peserta didik untuk mengamati denganmembaca buku BAB 1, Sub Bab D. Nilai-nilai Pancasila dalampenyelenggaraan pemerintahan. 5. Guru menanamkan sikap teliti dan cermat dalam membaca subbab tersebut. 6. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting danmungkin dapat dieksplorasi dari bacaan tersebut. |
| Inti  ( 65 menit )  **Mengorganisasi**  **peserta didik untuk**  **belajar** | 1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok heterogen beranggotakan 4 – 5 orang. 2. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatatpertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didikuntuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secaramendalam dalam daftar pertanyaan. 3. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangandan kelompok dalam menyusun pertanyaan. 4. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyaijawaban mutlak “benar” sebuah masalah yang rumit dankompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkalibertentangan. 5. Selama penyelidikan peserta didik didorong untuk mengajukanpertanyaan dan mencari informasi tentang penerapan nilai-nilaiPancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 6. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu,namun peserta didik harus berusaha untuk belajar keras. 7. Peserta didik aktif terlibat dalam sejumlah kegiatanpenyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini dapatmenghasilkan penyelesaian masalah tersebut. |
| Membimbing  penyelidikan  individual dan  kelompok | 1. Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi   tentang kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI.   1. Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi   Tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif), ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:  a. Nilai Ketuhanan  b. Nilai Kemanusiaan  c. Nilai Persatuan  d. Nilai Kerakyatan, dan  e. Nilai Keadilan Sosial   1. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknyadari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada pesertadidik untuk berpikir tentang jawaban terhadap masalah tersebutdiatas dan pemecahan masalah jika nilai-nilai tersebut belumditerapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan RI. 2. Guru membimbing peserta didik untuk mencari informasidan menyelidiki penerapan nilai-nilai Pancasila dalampenyelenggaraan pemerintahan oleh kelompok. 3. Guru menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teksatau buku referensi lainnya. 4. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didikdengan membei konfirmasi atas jawaban peserta didik, ataumengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah merekalakukan. |
| Mengembangkan  dan menyajikan hasil  karya | 1. Guru membimbing kelompok untuk mengidentifikasi nilai-nilaiPancasila yang sudah di implementasi dalam penyelenggaraanpemerintahan dan upaya pemecahan masalah jika nilai - nilaitersebut belum diterapkan dalam penyelenggaraanpemerintahan RI 2. Guru membimbing peserta didik menyusun laporanhasil identifikasi penerapan Nilai-nilai Pancasila dalampenyelenggaraan pemerintahan. Laporan tersebut dapat berupabahan tayang (powerpoint) atau laporan tertulis. 3. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasiltelaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiapkelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lainmemberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerjadari kelompok penyaji. |
| Penutup  ( 10 menit )  Menganalisis dan  mengevaluasi proses  pemecahan masalah | 1. Guru memberikan bimbingan agar peserta didik mampumenganalisis dan mengevaluasi nilai-nilai Pancasila manakahyang telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahdan upaya pemecahan masalah jika nilai-nilai tersebut belumditerapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan RI 2. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikirandan aktivitas mereka selama proses kegiatan belajarnya. 3. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasiterhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. 4. salam |

**PENILAIAN**

**1. Penilaian Sikap**

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat,argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

**2. Penilaian Pengetahuan**

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada Latihan Tugas Mandiri 1.2. dan Tugas Mandiri 1.3. serta Tugas Kelompok 1.2.

Coba kalian cari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai nama-nama kabinet dari mulai presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Tulislah informasi yang kalian temuakan pada tabel di bawah ini.

Presiden dan Nama Kabinet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Presiden ke | Nama Presiden | Nama Kabinet |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Pengelompokan Kementerian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Lingkup Tugas | Nama Kementerian |
| Bidang politik, hukum dan keamanan |  |  |
| Bidang perekonomian |  |  |
| Bidang kesejahteraan |  |  |

**Tugas Kelompok:**

**Tugas dan fungsi lembaga pemerintahan non kementerian.**

Bacalah secara berkelompok buku sumber dan paraturan perundangundangan yang berkaitan dengan keberadaan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Kemudian identifikasi tugas dan fungsi dari lembagalembagayang disebutkan di atas. Tulislah hasil identifikasi kalian dalamtabel di bawah ini.

**Tugas dan fungsi lembaga pemerintahan non kementerian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama lembaga pemerintahan** | **Tugas dan fungsi** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **4** |  |  |
| **5** |  |  |
| **6** |  |  |

**3. Penilaian Keterampilan**

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengkomunikasikan secara lisan).

Kepala Cluring, 15 Juli 2019

SMAN 1 Cluring Guru mata Pelajaran

DWIANTO BUDHIONO, M.Pd UMIASIH, SP.d

NIP 19610206 198403 1 009 NIP 19720204 199903 2 007

LAMPIRAN MATERI PERTEMUAN PERTAMA

**1. Macam-Macam Kekuasaan Negara**

Menurut John Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu:

(a). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang

(b). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang, termasuk kekuasaan

untuk mengadili setiap pelanggaranterhadap undang- undang

( c). Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Menurut Montesquie kekuasaan negara dibagi :

a). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang

(b). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang

(c). Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk

kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.**ku Guru PPKn 55**

**2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia**

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia

terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara

vertikal.

**(a). Pembagian kekuasaan secara horizontal**

(1). Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah danmenetapkan Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankanundang-undang dan penyelenggraan

pemerintahan Negara.Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undangundang.Kekuasaan ini dipegang

oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 .

(4). Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitukekuasaan untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah

Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskandalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara

Republik Indonesia Tahun1945.

(5). Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yangberhubungan dengan

penyelenggaraan pemeriksaan ataspengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangansebagaimana ditegaskan dalam Pasal

23 E ayat (1) UUD NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 .

**(b). Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal**

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagiankekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antarabeberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara

vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asasdesentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asastersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan

kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota)untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan didaerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga**n**pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

LAMPIRAN MATERI PERTEMUAN KEDUA

**1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia**

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

(a). Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(b). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

(c). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(d). Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang**60**

**Kelas X SMA/MA/SMK/MAK**

Keberadaan Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

(a). Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan

barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan

tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

(b). Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan

negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya,

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

(c). Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

**2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi KementerianNegara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan

berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya.

(a). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yangnomenklatur/nama kementeriannya

secara tegas disebutkan dalamUUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(b). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruanglingkupnya disebutkan dalam

UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

(c). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangkapenajaman, koordinasi, dan

sinkronisasi program pemerintah.Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas,ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator, terdiri atas:

(a). Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

(b). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

(c). Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

**3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian**

Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulunamanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah

Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untukmembantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden danbertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Diantaranya adalah; Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Informasi Geospasial (BIG); Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi; dan lain-lain

LAMPIRAN MATERI PERTEMUAN KETIGA dan KEEMPAT

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara.

Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraanpemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhannya di dalam pelaksanaan tugasnya.

Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika seseorang harus melakukan korupsi atau penyelewengan harta negara lainnya dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin *good governance* yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan lepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif.

Selain itu, nilai spiritualitas menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan.

LAMPIRAN PENILAIAN**I KOMPETENSI BAB 1**

**A. Pilihan Ganda**

**Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar !**

1. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang …
2. kuasaan legislatif
3. kekuasaan eksekutif
4. kekuasaan yudikatif
5. kekuasaan federatif
6. kekuasaan koordinatif
7. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang. Hal tersebut diatur dalam …
   1. Pasal 20 Ayat (1)
   2. Pasal 20 Ayat (2)
   3. Pasal 20 Ayat (3)
   4. Pasal 20 Ayat (4)
   5. Pasal 20 Ayat (5)
8. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas keresidenan adalah.....
   1. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
   2. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
   3. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
   4. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariatan negara
   5. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.
9. Hak prerogratif diartikan sebagai....
   1. Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
   2. Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
   3. Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
   4. Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
   5. Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
10. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ....
11. Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
12. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
13. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepadapresiden
14. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya
15. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbanganDPR

6. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.

(2). Kabinet dibentuk oleh presiden.

(3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

(4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari....

1. Bentuk negara kesatuan
2. Bentuk negara federasi
3. Bentuk pemerintahan republik
4. Sistem pemerintahan presidensil
5. Sistem pemerintahan parlementer
6. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

(1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.

(2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.

(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.

(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.

(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

(6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

* 1. 1 dan 2 d. 4 dan 6
  2. 2 dan 3 e. 5 dan 6
  3. 3 dan 5

1. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, *kecuali* …
   1. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
   2. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
   3. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
   4. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
   5. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
2. Perhatikan data di bawah ini!

(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan

(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakilrakyat.

Berdasarkan data di atas yang merupakan implementas dari nilai kerakyatan terdapat

pada nomor …

* 1. 2 dan 4
  2. 1 dan 3
  3. 1 dan 4
  4. 1 dan 2
  5. 3 dan 4

1. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, *kecuali* …
   1. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.
   2. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
   3. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan.
   4. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
   5. Bersikap terbuka terhadap semua perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa

**B. Uraian**

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !**

1. Pada hakikatnya kekuasaan negara menurut teori trias, Montesquie terdiri atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berdsarkan hal tersebut Jelaskan jenisjenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia !
2. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 berdampak pada penyelenggaraan pemerintahanNegara. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannyaperubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 !
3. Pada dasarnya selain memiliki Kementerian Negara, pemerintah Republik Indonesiamemiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang dahulu dikenal dengan istilahlembaga pemerintahan non-departemen. Jelaskan dan berikan contoh LembagaPemerintah Non-Kementerian Republik Indonesia !
4. Pada hakikatnya Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Sebutkan 3 (tiga) tugas kementerian negara dalammenyelenggarakan pemerintahan negara !
5. Pada hakikatnya keberadaan pemerintah daerah menunjang pemerintah pusat dalammenjalankan efektifitas dan efisiensi pemerintahan Negara. Jelaskan pentingnyakeberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan diRepublik Indonesia !

**C. Kunci Jawaban**

**1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JAWABAN** | **NO** | **JAWABAN** |
| **1** | **B** | **6** | **D** |
| **2** | **A** | **7** | **D** |
| **3** | **A** | **8** | **E** |
| **4** | **C** | **9** | **A** |
| **5** | **D** | **10** | **D** |

**Nilai = BetulX 100**

**10**

**2. Kunci Jawaban Soal Uraian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Kunci Jawaban** | **skor** |
| **1** | Jenis-jenis kekuasaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia.  a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.  b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.  c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undangundang. | **3** |
| **2** | Karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis  Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.  2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh  Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia  memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.  3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyatmemegang kekuasaan membentuk undang-undang.  4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa  Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.  6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang - undang. | **6** |
| **4** | Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawahpresiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.  Contoh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, di antaranya adalah sebagai berikut.  a. Badan Intelijen Negara (BIN)  b. Badan Narkotika Nasional (BNN)  c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  d. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)  e. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)  g. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)  h. Badan Pertanahan Nasional (BPN)  i. Badan Pusat Statistik(BPS)  j. Badan SAR Nasional (Basarnas)  k. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)  l. Dan lain-lain | **3** |
| **4** | Tugas kementerian negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negara ada 3 sebagai berikut.  1) Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.  2) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan  atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.  3) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas  pelaksanaan tugas di bidangnya. | **3** |
| **5** | Keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia sangat penting karena secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di negara kita terdapat  mekanisme pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam  sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. | **3** |
|  | Total skor | **18** |

D. **Penilaian Soal Uraian**



Penilaian Soal NO 6 (HOTS); rubrik penilaiannya adalah sbb:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KUALITAS JAWABAN** | **NILAI** |
| 1 | Jika jawaban hanya didasarkan 1 alasan logis | 20 |
| 2 | Jika jawaban hanya didasarkan 2 alasan logis | 40 |
| 3 | Jika jawaban hanya didasarkan 3 alasan logis | 60 |
| 4 | Jika jawaban hanya didasarkan 4 alasan logis | 80 |
| 5 | Jika jawaban hanya didasarkan 2-4 alasan logis dan ada alasan yang sifatnya empaty | 100 |

* 1. **Nilai akhir**= nilai nomor ( (1-5) + nilai nomor 6 ) : 2

**PROGRAM REMEDIAL**

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks pelajaran PPKn pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Bab 1. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

**PROGRAM PENGAYAAN**

Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab1. Selain itu peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

Lampiran :

Format penilaian sikap spiritual

Kelas : ……………………….

Hari, Tanggal : ……………………….

Pertemuan Ke- : ……………………….

MateriPokok : ……………………….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Nama siswa | Aspek yang di nilai | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ana |  |  |  |  |  |
| 2 | Budi |  |  |  |  |  |
| 3 | Citra |  |  |  |  |  |
| 4 | dona |  |  |  |  |  |

Keterangan :

* + 1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan
    2. Mengucap syukur setelah berhasil mengerjakan tugas
    3. Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat
    4. Menjalankan ibadah dengan tekun dan tepat waktu
    5. Menambah rasa keimanan setelah mempelajari iptek

Format penilaian sikap sosial

Kelas : ……………………….

Hari, Tanggal : ……………………….

Pertemuan Ke- : ……………………….

MateriPokok : ……………………….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Nama siswa | Aspek yang di nilai | | | | |
| jujur | disiplin | Tanggung jawab | toleransi | Percaya diri |
| 1 | Ana |  |  |  |  |  |
| 2 | Budi |  |  |  |  |  |
| 3 | Citra |  |  |  |  |  |
| 4 | dona |  |  |  |  |  |

Format jurnal

Kelas : ……………………….

MateriPokok : ……………………….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Hari / tanggal | nama | kelas | Kejadian / peristiwa | penilaian | |
| positif | negatif |
|  |  |  |  |  |  |  |

Penilaian Ketrampilan( Praktek )

Penilaian ketrampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil identifikasi tentang pola nilai pancasila yang di terapkan dalam pemerintahan Indonesia. Format penilaian dapat menggunakan contoh sebagaimana terdapat pada bagian lampiran Buku Guru.

**TELAAH RPP**

**INSTRUMEN TELAAH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

**Nama Guru : UMIASIH, SP.d**

**Mata Pelajaran : PPKN**

**Kelas : X / GANJIL**

**Nama sekolah : SMAN 1 CLURING, BANYUWANGI**

| **NO** | **Komponen/Aspek** | **HasilTelaah** | | | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tidakada/tidaksesuai (0)** | **Kuranglengkap/kurangsesuai (1)** | **Lengkap/sesuai (2)** |  |
| **A** | **Identitas RPP** |  |  |  |  |
| 1 | Terdapat: nama satuan pendidikan, kelas/semester, mata pelajaran, materi pokok/tema, alokasi waktu |  |  |  |  |
| B | KomponenUtama RPP |  |  |  |  |
| 2 | Minimal memuat 8 komponenutamadanlampiranpendukung RPP: (a) KI; (b) KD dan IPK; (c) TujuanPembelajaran; (d) MateriPembelajaran; (e) MetodePembelajaran; (f) Media PembelajarandanSumberBelajar; (g) Langkah-langkahPembelajaran; (h) PenilaianHasilBelajar; (i) Lampiranpendukung RPP (materipembelajaran, instrumenpenilaian, dll) |  |  |  |  |
| **C** | **KelengkapanKomponen RPP** |  |  |  |  |
| **C1** | **Rumusan KI, KD, dan IPK** |  |  |  |  |
| 3 | Mencakup KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4sesuaidenganrumusanpadaPermendikbud No 21Tahun 2016 |  |  |  |  |
| 4 | Kompetensi Dasar(KD) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (khusus PPKn dan PABP)sedangkanmatapelajaran lain mencakup pengetahuandanketerampilanyang dikutibdariPermendikbud No. 24 Tahun 2016 |  |  |  |  |
| 5 | Menjabarkan IPK berdasarkan KD dari KI 3, KD dari KI 4, KD dari KI1 dan KD dari KI 2 (khusus PPKn dan PABP)sedangkanmatapelajaran lain KD dari KI 3danKD dari KI 4. |  |  |  |  |
| 6 | IPK disusun menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur/dilakukan penilaian sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. |  |  |  |  |
| 7 | IPK dari KD pengetahuan menggambarkan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan meliputifaktual, konseptual, prosedura, dan/atau metakognitif |  |  |  |  |
| 8 | IPK dari KD keterampilan memuat keterampilan abstrak dan/atau ketrampilan konkret |  |  |  |  |
| **C2** | **RumusanTujuan Pembelajaran** |  |  |  |  |
| 9 | Mencerminkan pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan |  |  |  |  |
| 10 | Memberikan gambaran proses pembelajaran |  |  |  |  |
| 11 | Memberikan gambaran pencapaian hasil pembelajaran |  |  |  |  |
| 12 | Dituangkan dalam bentuk deskripsi, memuat kompetensi yang hendak dicapai olehpeserta didik |  |  |  |  |
| **C3** | **Materi Pembelajaran** |  |  |  |  |
| 13 | Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuaisesuiadengancakupanmateri yang termuatpada IPK atau KD pengetahuan |  |  |  |  |
| 14 | Memuat materi yang bersifatfaktual, konseptual, dan/atauprosedural |  |  |  |  |
| 15 | Cakupanmateri sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan |  |  |  |  |
| 16 | Mengakomodasimuatanlokaldapatberupakeunggulanlokal, kearifanlokal, kekiniandll yang sesuaidengancakupanmateripada KD pengetahuan |  |  |  |  |
| C4 | **MetodePembelajaran** |  |  |  |  |
| 17 | Menggunakanpendekatanilmiahdan/ataupendekatan lain yang relevandengankarakteristikmasing-masingmatapelajaran. |  |  |  |  |
| 18 | Menerapkanpembelajaranaktif yang bermuarapadapengembangan HOTS |  |  |  |  |
| 19 | Menggambarkan sintaks/tahapan yang jelas (apabilamenggunakan model pembelajarantertentu). |  |  |  |  |
| 20 | Sesuai dengan tujuan pembelajaran |  |  |  |  |
| 21 | Menggambarkan proses pencapaian kompetensi |  |  |  |  |
| C5 | **Media PembelajarandanSumberBelajar** |  |  |  |  |
| 22 | Mendukungpencapaian kompetensi dan pembelajaran aktifdenganpendekatanilmiah |  |  |  |  |
| 23 | Sesuai dengan karakterisitik peserta didik |  |  |  |  |
| 24 | Sumber belajar yang digunakan mencakup antara lain bahan cetak, elektronik, alam dan sumber belajar lainnya |  |  |  |  |
| 25 | Memanfaatan teknologi pembelajaran sesuai dengan konsep dan prinsip tekno-pedagogis*/Techno-Pedagogical Content Knowledge (TPACK*) |  |  |  |  |
| **C6** | **Langkah kegiatan pembelajaran** |  |  |  |  |
| 26 | Memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup |  |  |  |  |
| 27 | Kegiatan pendahuluan memuat :  pengkondisian peserta didik, kegiatan religius, apersepsi, penyampaian tujuan pembelajaran, kegiatan dan penilaian yang akan dilakukan |  |  |  |  |
| 28 | Kegiatan Inti   * Bentuk kegiatan pembelajarannya berupa pembelajaran aktif (*active learning*) dengan menggunakan berbagai model dan/atau metode pembelajaran dengan pendekatan ilmiah maupun pendekatan lain yang relevan. * Sesuai dengan model dan/atau metode pembelajaran yang digunakan * Menggambarkan tahapan kegiatan yang runut dan sistematik (dari LOTS menuju HOTS) * Menggambarkan kemampuan literasi. * Menggambarkan proses pembelajaran yang menimbulkan interaksi multi-arah, antar peserta didik, interaksi peserta didik dengan guru, dan interaksi dengan bahan/alat/lingkungan belajar * Menggambarkan proses pembelajaran yang menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik * Menggambarkan gradasi pencapaian kompetensi dalam pembelajaran * Mengembangkan karakter * Kegiatan pembelajarannya mendidik dan dialogis yang bermuara pada berkembangnya karakter dan *Higher Order Thinking Skills* (*HOTs*) atau Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (KeBiTT) peserta didik. * Mengintegrasikan keterampilan hidup abad 21 atau dikenal dengan 4C (*critical thinking, creativity, collaboration, communication*) atau berpikir kritis, berkreasi, berkolaborasi/bekerjasama, berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. |  |  |  |  |
| 29 | Kegiatan penutup memuat:   * Rangkuman, kesimpulan, refleksi, penilaian dan tindak lanjut penilaian * Penyampaian pencapaian KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 ,dan pencapaian tujuan pembelajaran |  |  |  |  |
| **C7** | **PenilaianHasilBelajar** |  |  |  |  |
| 30 | Memuat rancangan penilaian |  |  |  |  |
| 31 | Memuat jenis/tehnik penilaian, bentuk penilaian, instrumen dan pedoman penskoran |  |  |  |  |
| 32 | Mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dansikapkhususpadamatapelajaran PPKN dan PABP |  |  |  |  |
| 33 | Sesuai dengan kompetensi (IPK dan/atau KD) |  |  |  |  |
| 34 | Sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran |  |  |  |  |
| 35 | Sesuai materi pembelajaran |  |  |  |  |
| 36 | Memuat soal HOTSdansoal-soalketerampilankhususmatapelajaran (misalnya Agama, SeniBudaya, Bahasa, dll) |  |  |  |  |
|  | JUMLAH |  |  |  |  |

Keterangan:

1. Nilai = JumlahSkorx 100

72

1. Predikat : 56 X 100 : 77,8

72

( dapat di gunakan untuk contoh bagi guru lain dengan perbaikan pada bagian – bagian tertentu )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nilai | Predikat | Keterangan |
| N < 70 | C | Perlu pembinaan |
| 71≤N≤80 | B | Dapat digunakan untuk contoh bagi guru lain dengan perbaikan pada bagian-bagian tertentu |
| N>80 | A | Dapat digunakan untuk contohbagi guru lain |

Surabaya, 31 Maret 2018

Penelaah

Dra. MANIS PUJIANDAYANI